Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaksanaan Kepres No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi dalam Kasus Pembunuhan

Muhammad Hariri

MDS ar-Riyadl Surabaya | m_hariri05@gmail.com

Abstract: This paper aims to find out how the legal review of remissions in murder cases, as stipulated in Presidential Decree No. 174 of 1999. Furthermore, it was concluded by the authors that: first, the crime of murder that gets remission has their respective criteria, in the sense of granting remission depending on where the sentence is, the sentence is classified as temporary or classified as a death sentence if the crime is temporary, then will get remission on condition - Certain conditions, if criminal with capital punishment, then it cannot be unless there are other provisions. Second, the procedures for implementing the remission of murder perpetrators must fulfill several conditions determined by the Presidential Decree and the Minister of Law. And third, if viewed from the Islamic criminal law the implementation of granting remissions for the perpetrators of murder is very good, because with the remission it can make someone to change their behavior and also provide an opportunity for the murderer to avoid the act again, with the aim and encouragement to back to the midst of society.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap remisi dalam kasus pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Kepres No. 174 Tahun 1999. Selanjutnya disimpulkan oleh penulis bahwa: *pertama*, tindak pidana pembunuhan yang mendapatkan remisi memiliki kriteria masing-masing, dalam artian pemberian remisi tergantung darimana hukuman, masa hukuman tergolong sementara atau tergolong pidana mati kalau pidananya sementara, maka akan mendapatkan remisi dengan syarat-syarat tertentu, kalau pidana dengan hukuman pidana mati, maka tidak bisa kecuali ada ketentuan yang lain. *Kedua*, tata cara dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Keputusan Presiden dan Menteri Hukum. Dan *ketiga*, jika ditinjau dari hukum pidana Islam pelaksanaan

pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sangat baik, karena dengan adanya remisi itu bisa menjadikan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya dan juga memberikan kesempatan pada pelaku pembunuhan untuk menghindari perbuatan itu lagi, dengan tujuan dan dorongan untuk kembali ketengah-tengah masyarakat.

Kata kunci: hukum pidana Islam, pemberian remisi, tindak pidana pembunuhan.

A. Pendahuluan

Pada hakekatnya hukum pidana dan kegunaannya bermaksud agar masyarakat dan setiap orang anggota masyarakat dapat dilindungi hukum pidana, serta untuk mencapai jalan hidup yang sejahtera lahir dan batin.¹ Sehubungan dengan perlindungan hukum² pidana bagi masyarakat dan anggotanya itu perlu diingatkan tentang perkembangan pandangan hukum pidana yang baru, karena sejak lama dipikirkan bahwa pada fungsi primer hukum pidana itu untuk menanggulangi kejahatan, dan fungsi subsidier hukum pidana itu hendaknya mengingat sifat negatifnya sanksi agar baru ditetapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai lagi. Hukum pidana hanyalah salah satu sarana atau upaya penanggulangan kejahatan.³

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat, dengan menetapkan apa yang harus atau yang

---

¹ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015): 298.

² Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum, yang ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Lihat: Nafi' Mubarak, "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak," *Jurnal Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016): 48.

³ Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Yogyakarta: liberty, 1988), 52.

diperbolehkan atau yang diajukan. Dengan adanya hukum dapat diketahui adanya garis pembeda antara apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan dan apa yang bersifat anjuran.

Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Dengan adanya itu dicapai jalan menciptakan program-program yang bersifat nasihat-nasihat yang menyembuhkan si penjahat. Bagi para sosiolog, maksud tersebut dapat dicapai dengan jalan mengadakan pendidikan dan latihan keja keterampilan. Lebih-lebih di Indonesia di mana kesulitan-kesulitan hidup seperti lowongan kerja semakin memperbudak kondisi ekonomi. Bagaimanapun juga, tujuan permasyarakatan seperti ini merupakan hal yang paling penting dalam dunia moderen sekarang ini.⁴

Sedangkan tujuan dari pidana yang dijatuhkan tersebut adalah di samping untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan, juga bertujuan mendidik agar pelaku kejahatan yang bersangkutan dapat insaf, dan menjadi baik.⁵ Di samping itu pidana penjara juga bermaksud untuk mendidik dan menakut-nakuti anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Namun demikian tidaklah berarti, bahwa terhadap kejahatan tidak perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangan, salah satu cara untuk menaggulangi kejahatan ialah, dengan menerapkan hukum pidana. Kita mengetahui bahwa pada masa-masa yang silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat di mana tujuannya adalah menakut-nakuti masyarakat yang melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.

---

⁴ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 17.

⁵ Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 302.

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum dan bersumber pada Pancasila dan UUD 45 mengartikan pidana penjara sebagai pidana masyarakat, yakni bahwa pemberian pidana kepada pelakunya tidak semata-mata memberi nestapa dan pembalasan, akan tetapi pemberian pidana masyarakat justru dititikberatkan kepada pendidikan serta pemberi bekal kehidupan bagi narapidana, agar setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan dapat hidup kembali di tengah-tengah masyarakat serta dapat diterima oleh masyarakat, di mana dia berada, seperti layaknya anggota masyarakat yang lain.

Upaya pelaksanaan pidana penjara baru yang didasarkan prikemanusiaan dengan cara memperluas usaha kelonggaran pidana untuk menjauhkan pengaruh buruk tembok penjara. Berbagai alternatif dari upaya baru tersebut berupa bentuk pidana bersyarat, cuti bersyarat, serta peningkatan remisi, dan sosial lainnya sampai bentuk pidana penjara di tempat terbuka. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dengan pendekatan pembinaan di dalam masyarakat serta lingkungannya. Berbagai usaha pembinaan yang mengandung unsur bimbingan dan keterampilan yang bersifat edukatif, korektif, dan defensif serta mencakup aspek individu dan sosial.⁶

Dalam kasus pembunuhan pun hukum Islam mengenal asas pemaafan,⁷ sebagaimana yang diperkenankan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178, yang artinya: *"Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik."*⁸

---

⁶ Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 11.

⁷ Nafi' Mubarak, "Korban Pembunuhan dalam Perspektif Viktimologi dan Fikih Jinayat," *Jurnal Al-Qānūn* 12, no. 2 (Desember 2009): 484.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 28.

Namun, asas pemaafan ini tidak dilakukan begitu saja tanpa diimbangi dengan pembinaan keselarasan sosial, terutama pihak-pihak yang bersangkutan dengan peristiwa pembunuhan, khususnya pihak-pihak keluarga yang terbunuh dan pembunuh, sehingga tidak terjadi dendam kesumat serta terjaminnya rasa keadilan dan ketentraman masyarakat. Dalam hukum pidana hal ini sering kali dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk menolak hukum Islam, serta menilainya sebagai hukum barbar dan kejam tidak berprikemanusiaan.⁹

Pengampunan terhadap *qiṣāṣ* dibolehkan menurut kesepakatan para *Fuqahāʾ*, bahkan lebih utama dibandingkan pelaksanaannya. Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Redaksinya bisa dengan *lafaz* (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan, dan sebagainya.¹⁰

Orang yang berhak memiliki dan memberikan pengampunan adalah orang yang memiliki hak *qiṣāṣ*. Menurut jumhur ulama' yang terdiri atas Imam Abu Ḥanifah, Imam Syafi'i, Imam Aḥmad, pemilik *qiṣāṣ* adalah semua ahli waris. Akan tetapi, menurut Imam Maliki, hak *qiṣāṣ* dimiliki oleh *aṣabah* laki-laki yang paling dekat derajatnya dengan korban, dan perempuan yang mewarisi dengan syarat-syarat tertentu.¹¹

Alternatif memberikan ampunan diserahkan pada wali terbunuh. Mereka adalah ahli waris dari si terbunuh, bilamana mereka menghendaki boleh menuntut hukum *qiṣāṣ* atau memberi ampun, seandainya ada salah satu di antara mereka memaafkan, maka gugurlah *qiṣāṣ* itu, sebab ia

---

⁹ Juhaya Praja S., *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 20.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 161.

¹¹ Muslich, 162.

adalah salah satu dari ahli waris yang tidak terpisah dari anggota lainnya.¹²

Muhammad Ibnu Ḥasan, pengikut Imam Abu Ḥanifah, meriwayatkan bahwa Umar Ibnu al-Khaṭṭab ra. Dihadapkan seorang laki-laki yang telah melakukan pembunuhan secara sengaja. Kemudian Umar memerintahkan agar ia dihukum mati, tetapi sebagian dari wali si terbunuh memaafkannya. Umar tetap memerintahkan agar ia dihukum mati. Abdullah Ibnu Mas'ud berkata: "jiwa si korban adalah milik mereka bersama; dikala orang lain (salah satu dari keluarga korban) memberi maaf, maka berarti ia telah menghidupkan satu jiwa. Oleh karena itu haknya untuk menuntut *qiṣāṣ* (yang dimaksud di sini ialah orang-orang yang tidak memberi maaf) tidak akan direalisasikan kecuali hak yang lain dicairkan terlebih dahulu. Lalu sahabat Umar bertanya kepadanya: "kalau demikian bagaimana pendapatmu?" sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud berkata: "hendaknya membebaskan *diyāt* pada hartanya (pembunuh), dan anda tidak memberikan bagian terhadap (wali) yang memberi maaf ". Umar menyambutnya: "Aku pun berpendapat demikian."

Muhammad (perawi) berkata: "Sayapun sependapat".¹³

Dan Ḥadis | Nabi saw., dari Ata' ibn Abi Maimunah berkata: sepengetahuan saya setiap ada perkara *qisās* dilaporkan kepada Rasulullah saw. maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan"(HR. Abi Daud dan Ibn Majah).

Di dalam ḥadis| Nabi diatas dijelaskan dari riwayat Anas Ibn Malik, ia berkata: sepengetahuan saya setiap ada

---

¹² Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 10 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 10.

¹³ Sābiq, 45.

perkara *qiṣāṣ* dilaporkan kepada rasul, maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan.¹⁴

Memaafkan orang yang melakukan pembunuhan dari si korban atau keluarganya sangat didorong dan terpuji, walaupun demikian tidak berarti si pembunuh tidak dikenai hukuman. Sanksinya diserahkan kepada *Ulil Amri*, soalnya si pembunuh ini telah melanggar dua hak (adami) dan hak masyarakat/jamaah/Allah.¹⁵

Dari ḥadis| yang telah diriwayatkan oleh sahabat Anas Ibn Malik bahwasannya Rasulullah memerintahkan kita untuk memaafkan setiap orang yang melakukan atau mendapatkan hukuman *qiṣāṣ* agar mereka dimaafkan untuk menghindari balas dendam yang makin melebar pada diri kita dan pada orang lain.

A. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembunuhan

Para ulama' mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam arti istilah, pembunuh didefinisikan oleh Wahbah az-Zuḥayliy yang mengutip pendapat Khatib Syarbini sebagai berikut: Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.¹⁶

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut: Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.¹⁷

---

¹⁴ Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 157.

¹⁵ Djazuli, 158.

¹⁶ Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 217.

¹⁷ Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tashrī' al-Jināy al-Islāmy*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992), 6.

2. Macam-macam pembunuhan

Macam-macam pembunuhan adalah sebagai berikut:

a. Sengaja (*al-'Amdu*)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan ia mengendaki akibatnya berupa kematian korban. Tentu saja pertanggung jawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat di bawahnya.

b. Menyerupai sengaja (*syibhul 'amdi*)

Hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Ini pun masih diperselisihkan oleh para *Fuqahā'*. Imam Malik misalnya tidak mengenal istilah ini (menyerupai sengaja), baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan.

Pengertian *syibhul 'amdi* adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam tindakan pidana pembunuhan, ukuran *syibhul 'amdi* ini dikaitkan dengan alat yang digunakan. Kalau alat yang di gunakan itu bukan alat yang biasa (*galib*) untuk membunuh, maka perbuatan tersebut termasuk kepada menyerupai sengaja. Dalam pertanggungjawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

c. Keliru (*al-khata'u*)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Kekeliruan ini ada dua macam :

- 1) Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang lain.
- 2) Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang

menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

d. Keadaan yang disamakan dengan Keliru

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan

- 1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
- 2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kalalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, seperti seseorang yang menggali parit ditengah jalan untuk mengalirkan air tetapi ia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.¹⁸

Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati.

2. **Sanksi Qisās**

Terkait dengan penjatuhan hukuman *Qisās* bisa disimpulkan beberapa hal:

a. Haram melakukan pembunuhan

Sebagaimana dalam QS an-Nisā' ayat 93, yang artinya: *"Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal*

---

¹⁸ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 77-78.

ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Q.S *an-Nisā'* ayat 93).¹⁹

Dan dalam Q.S *al-Isrā'* ayat 33, yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S *al-Isrā'* ayat 33).²⁰

- b. Orang mendahului pembunuhan, menanggung dosa orang yang mengikuti pembunuh itu

Dinyatakan dalam ḥadis Nabi saw. dari Anas dari Abdillah ibn Murrah dari Masruq dari Abdillah berkata: Rasulullah saw berkata: “ tidaklah seorang di bunuh kecuali sebagai pertanggungjawaban darahnya yang mengalir atas anak adam yang pertama, karena dialah yang mula-mula melakukan pembunuhan(H.R. Bukhari Muslim).²¹

- c. Orang melakukan pembunuhan sengaja Imannya dangkal

Disebutkan dalam hadits dari 'Uqail, dari Ibn Syihab, dari Abi Bakri ibn Abdur Rahman dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: ”Tidaklah seorang akan berzina ketika ia melakukannya dia sebagai mukmin, dan tidaklah seorang akan mencuri ketika ia melakukannya dia sebagai orang mukmin, dan tidaklah seseorang akan minum-minuman keras ketika ia melakuannya dia sebagai orang mukmin, dan tidak pula seseorang akan membunuh apabila ia seorang

---

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, 94.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, 286.

²¹ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Jāmi' al-Ṣoḥīh*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 100.

mukmin.” (H.R. Bukhari Muslim).²²

3. **Macam-macam *Qisās***

Terdapat beberapa macam qisas, yaitu:

- a. *Qisās* jiwa, dalam *qisās* ini adalah penghilangan nyawa orang lain yang menjadi tujuan utamanya.
- b. *Qisās* anggota badan, dalam *qisās* ini pelaku melakukan penganiayaan terhadap tubuh seseorang yang tidak sampai menghilangkan nyawa orang lain.

4. **Syarat-syarat *Qisās***

Syarat-syarat dijatuhkannya *qisās*, adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang terbunuh dilindungi darahnya.
- b. *Balig*
- c. Berakal
- d. Pembunuh dalam kondisi bebas memilih.
- e. Pembunuh bukan orang tua dari si terbunuh.
- f. Pembunuh dan terbunuh sederajat.
- g. Tidak ada orang lain yang ikut membantu pembunuh di antara orang-orang yang tidak wajib hukum *qisās* atasnya.

5. **Hapusnya Hukuman *Qisās***

Pelaksanaan dan penjatuhan hukum *qisās*, dihapus dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hilangnya objek *qisās*
- b. Objek *qisās* dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa (nyawa) pelaku (pembunuh). Apabila objek *qisās* tidak ada, karena pelaku meninggal dunia, dengan sendirinya hukuman *qisās* menjadi gugur.
- c. Pengampunan
- d. Pengampunan terhadap *qisās* diperbolehkan menurut kesepakatan para *Fuqahā'*, bahkan lebih utama

---

²² Muḥammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ lal-Bukhārī*, Juz 8 (Kairo: Dār Iḥya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 13.

dibandingkan dengan pelaksanaannya. Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan dengan secara lisan atau secara tertulis. Redaksinya bisa dengan *lafadz* (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan lain sebagainya.²³

e. *Ṣulḥ* (perdamaian)

Melalui perdamaian pihak pembunuh bisa membayar tanggungan yang lebih kecil, sama atau lebih besar dari *diyāt*. Dan orang yang berhak mengadakan perdamaian adalah, orang yang berhak atas *qiṣāṣ* dan pemaafan.

Ṣulḥ (perdamaian) ini statusnya sama dengan pemaafan, baik dalam hak pemiliknnya maupun dalam pengaruh atau hakikat hukumnya, yaitu dapat menggugurkan *qiṣāṣ*. Perbedaan dengan pengampunan adalah pengampunan itu pembebasan *qiṣāṣ* tanpa imbalan, sedangkan *ṣulḥ* adalah pembebasan dengan imbalan.²⁴

f. Diwarisnya hak *qiṣāṣ*

Qiṣāṣ juga dapat hapus karena diwariskan kepada keluarga, karena adanya wali korban yang menjadi pewaris hak *qiṣāṣ*, seperti pembunuh yang meninggal dunia terus *pengqiṣāṣannya* digantikan oleh ahli waris seperti anaknya.

6. Pidana penjara dalam hukum pidana Islam

Pidana penjara dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah hukuman kawalan, yang merupakan salah satu cabang dari hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* sendiri merupakan hukuman yang di jatuhkan atas kejahatan yang tidak dijatuhi hukuman yang di tentukan oleh syariat Islam, yaitu hukuman *ḥudūd*, *qiṣāṣ* dan *diyāt*.²⁵ Sedangkan hukum

---

²³ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 161.

²⁴ Muslich, 164.

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 299.

qiṣāṣ dan *diyāt* merupakan hukum yang ada nashnya seperti: hukuman bagi pezina, pencuri, dan pembunuh.

Hukuman kawalan sebagai suatu alternatif dari hukuman *ta'zir* ini terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Hukuman kawalan dalam waktu terbatas

Hukuman kawalan waktu terbatas adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum. Para ulama' berbeda pendapat, ada yang mengatakan dua bulan atau tiga bulan, di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa lamanya hukuman itu terserah penguasa.

Menurut Imam al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula dipenjara lebih lama.²⁶

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa tidak ada batas tertinggi yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara seperti *ta'zir*, dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarimah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi.²⁷

b. Hukuman kawalan dalam waktu tidak terbatas.

Di mana hukuman kawalan ini tidak ditentukan waktunya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus- menerus sampai terhukum mati atau taubat dan memperbaiki dirinya, orang yang dihukumi tersebut ialah penjahat yang berbahaya atau orang berulang-ulang melakukan kejahatan yang berbahaya.²⁸

Selain itu juga , seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi *qiṣāṣ* karena ada hal-hal yang meragukan dan lain-lain.

---

²⁶ Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 236.

²⁷ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 263.

²⁸ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 308.

Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat sangat berbahaya, misalnya orang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau orang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati di makan harimau, maka pelaku dikenakan hukuman pidana penjara seumur hidup (sampai ia mati di penjara).²⁹

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa hukuman kawalan itu termasuk dalam salah satu jenis hukuman *ta'zir*, menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya diartikan sebagai hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat, yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau yang kepastian hukumnya belum ada, mengenai persyaratan dilakukannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut.³⁰

B. Pembunuhan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diyatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP.

Unsur-unsur pembunuhan adalah:

- a. Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukan.
- b. Dengan sengaja

Dalam ilmu pidana dikenal tiga jenis bentuk sengaja, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud.
- b. Sengaja dengan keinsafan.

---

²⁹ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 263.

³⁰ Sābiq, *Fikih Sunnah*, 154.

c. Menghilangkan nyawa orang lain.³¹

Menurut R.Sugandi, perbuatan pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, dengan disengaja. Karena apabila matinya orang lain itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan tersebut hanya merupakan pelanggaran yang mengakibatkan matinya orang lain. Kemungkinan lain jika perbuatan pidana pembunuhan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja akan di anggap sebagai penganiayaan berat yang menimbulkan matinya orang lain.

Menurut R.Sursilo yang dimaksud dengan perbuatan pidana pembunuhan adalah “perbuatan yang mengakibatkan orang lain”. Jelaslah bahwa secara umum perbuatan pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan.

2. Kejahatan Terhadap Nyawa

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah yang dimuat dalam bab XIX KUHP pasal 338 s/d 350.

Kesengajaan adalah kesengajaan jahat sebagai suatu keinginan untuk berbuat tidak baik, dalam kesengajaan gerakan yang ditimbulkan karena refleksnya pelaku. Sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-

---

³¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 22.

unsur yang diperlukan.³²

Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditujukan dalam tiga hal perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ihwal yang menyertai perbuatan pidana.³³

Teknis pembunuhan ini dinamakan *delik material*, di mana kejahatan baru dianggap selesai, apabila akibatnya telah terjadi, tidak dirumuskan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Pembunuhan di atas disebut "pembunuhan biasa" dalam bahasa asing dinamakan "doodslag" di mana diperlukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niat pembuat.³⁴

Di samping itu pembunuhan tersebut harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh, tidak dipikir-pikir lebih panjang misalnya A sekonyong-konyong datang di rumah melihat bahwa isterinya sedang berzina dengan si B. Karena panas hati, timbul maksudnya untuk membunuh isteri dan si B itu, yang seketika itu maksud itu dilaksanakan, ia mencabut pistolnya yang ia bawa sebagai petugas Negara.³⁵

- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah dimuat dalam bab XXI pasal 359.

Kematian korban tidak dimaksudkan pada pasal 338 melainkan pasal 359. Teknik pembunuhan ini dinamakan *delik culpa*, pembunuhan ini disebut demikian karena salahnya seseorang yang menyebabkan matinya orang lain atau kurang hati-

---

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 172.

³³ Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 156.

³⁴ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus* (Bogor: Politeia, 1984), 149.

³⁵ Soesilo, 150.

hatinya seseorang sehingga menyebabkan matinya orang lain.

Rumusan “karena salahnya” adalah unsur “kelalaian” atau *culpa* yang menurut hukum pidana terdiri atas:

- 1) *Culpa* dengan kesadaran
- 2) *Culpa* dengan tanpa kesadaran.³⁶

Van Hamel menolak pembagian *culpa* yang disadari dan tidak disadari karena katanya juga pada *culpa* yang tidak disadari pembuat secara nyata telah menyingkirkan dari pikirannya akibat secara konkreto. Tetapi Vos mengatakan bahwa apa yang dikemukakan Van Hamel itu tidak selalu begitu. Sebenarnya dalam praktek kata Vos pembagian ini tidak penting karena undang-undang tidak mengenal gradasi *culpa*. Katanya *culpa* yang disadari tidak selalu lebih serius dari pada yang tidak disadari. Kadang-kadang orang yang telah mengambil langkah-langkah perhatian ternyata lebih kecil bahayanya daripada perbuatan gegabah yang samasekali tidak berpikir tentang kemungkinan akibat sebelumnya.³⁷

Kematian orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh pembuat, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kekuranghati-hatian atau kelalaian terdakwa. Misalnya seorang sopir menjalankan mobilnya terlalu kencang sehingga menabrak orang sampai mati, atau orang berburu melihat sebuah sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan di dalam hutan dikira babi rusa kemudian ditembak dan mati. Akan tetapi sosok hitam yang disangka babi hutan ternyata adalah manusia, atau seorang bermain-main dengan senjata api, karena kurang berhati-hatinya meletus dan mengenai orang lain, sehingga mati dan lainnya.³⁸

---

³⁶ Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, 64.

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 126.

³⁸ Hamzah, 152.

Jongkers, memberikan contoh bahwa seseorang ingin membakar rumah dengan tiada maksud lain, akan tetapi di tempat itu ia mengetahui ada orang sakit yang sedemikian rupa sehingga akan meninggal apabila terkejut. Dengan meneruskan pembakaran itu, maka kesengajaan ditujukan kepada kematian orang yang sakit itu. Dalam hal kealpaan yang disadari bahwa si pelaku sadar akan hal yang pasti bisa membunuh dan dia menghindari, akan tetapi terjadi pula kematian orang lain. Lain halnya dengan kealpaan yang tidak disadari ia mengira bahwa perbuatannya tidak akan menimbulkan kematian orang lain, akan tetapi setelah kejadian ternyata perbuatannya telah menghilangkan nyawa orang lain.³⁹

2. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan

Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan jika kategori pembunuhan dengan sengaja adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan pasal 338
- b. Pembunuhan dengan pemberatan pasal 339, dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- c. Pembunuhan berencana pasal 340, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya pasal 341, dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
- e. Pembunuhan bayi berencana pasal 342, dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun.
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan pasal 344, dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- g. Membujuk atau mengajak orang agar bunuh diri pasal 345, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

---

³⁹ Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, 172.

- h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya pasal 346, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- i. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya pasal 347, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dan kalau perempuan itu yang mati maka, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya pasal 348, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Jika perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
- k. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya kandungan Pasal 349, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 346,347,348 dapat di tambah dengan sepertiga dan dapat di cabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan di lakukan.

Namun jika masuk kategori pembunuhan tidak sengaja maka sanksi pidananya adalah berupa: pembunuhan karena kesalahan pasal 359, dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun.

D. Kategori Kasus-kasus Pembunuhan Yang Mendapatkan Remisi Menurut Keputusan Presiden RI No. 174/Tahun 1999 Tentang Remisi

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang di dasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diindonesia. Remisi menurut kepres No. 174/Th 1999 tentang remisi pada pasal 1 remisi adalah: pengurangan masa pidana yang diberikan kepada nara pidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Mengingat remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dan juga negara indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk agar bisa meberikan

yang seharusnya diberikan kepada terpidana dengan adanya remisi tersebut biar mereka bebas dan diterima oleh masyarakat.

Sedangkan macam-macam adalah sebagai berikut:

1. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
2. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang di anut oleh narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
3. Remisi tambahan, apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁴⁰

Sedangkan besarnya remisi adalah sebagai berikut:

1. Untuk besarnya remisi umum, yaitu:
  - a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
  - b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
2. Untuk besarnya remisi khusus, yaitu:
  - a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
  - b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

---

⁴⁰ Keputusan presiden RI No 174 Th 1999 Tentang Remisi Pasal 2-3

3. Untuk remisi tambahan yaitu:
  - a. Satu perdua dari remisi umum yang diperoleh pada tahun bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
  - b. Satu pertiga dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membuat kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.⁴¹

Di atas dijelaskan tentang beberapa pembunuhan yang mendapatkan masa hukuman yang berbeda-beda, semisal hukuman sementara dengan masa tahanan minimal 1 hari sampai hukuman tahanan dua puluh tahun, dan ada juga pembunuhan yang mendapatkan masa hukuman seumur hidup. Bagaimanapun hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan tidak boleh lebih dari 20 tahun. Dan didalam Kepres RI No. 174/ Th.1999 pasal 1 setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi.⁴² Dari masa tahanan tersebut narapidana akan mendapatkan remisi yang diberikan kepada masing-masing pelaku tindak pidana pembunuhan antara lain:

1. Tindak pidana pembunuhan yang mencakup pidana sementara antara lain:
  - a. Pembunuhan pasal 338.
  - b. Pembunuhan bayi oleh ibunya pasal 341, dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
  - c. Pembunuhan bayi berencana pasal 342, dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun.
  - d. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan pasal 344, dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.

---

⁴¹ Keputusan presiden RI No 174 Th 1999 Tentang Remisi Pasal 5-6

⁴² Kepres RI No.174/Th. 1999 Tentang Remisi, Pasal 1

- e. Membujuk atau mengajak orang agar bunuh diri pasal 345, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
  - f. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya pasal 346, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
  - g. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya pasal 347, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dan kalau perempuan itu yang mati maka, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
  - h. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya pasal 348, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Jika perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
  - i. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya kandungan Pasal 349, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 346,347,348 dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.⁴³
2. Tindak pidana seumur hidup.

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang telah menjalani pidana selama 5 tahun, dengan lama sisa 15 tahun. Dan untuk perubahan dari pidana seumur hidup kepidana sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepresiden melalui menteri hukum dan perundang-undangan.⁴⁴ Untuk kasus pembunuhannya antara lain:

- a. Pasal 339, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang

---

⁴³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 125.

⁴⁴ Kepres RI No.174/Th. 1999 Tentang Remisi, Pasal. 9 poin. 1-4

dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta yang lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

- b. Pasal 340, Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁴⁵

E. Analisa Hukum Pidana Islam Tentang Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan

1. Ketentuan syarat-syarat remisi bagi pelaku pembunuhan.

Di bab tiga diterangkan bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan akan mendapatkan pengurangan masa hukuman, dengan syarat mereka telah memenuhi kriteria-kriteria dari pada syarat-syarat yang ditentukan oleh Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri.

Adapun syarat-syarat yang diperuntukkan bagi pelaku pembunuhan agar mereka dapat merasakan pengurangan masa tahanan adalah, berkelakuan baik, masa tahanan sudah mencapai 6 bulan, berbuat kemanfaatan bagi nusa bangsa. Dengan syarat itu mereka akan mendapatkan remisi, sebagaimana yang sudah ada di kepres dan kepmen.

Sebagaimana dalam Islam sendiri *al-Qur'an* telah menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan mereka mau menyadari perbuatannya, dalam artian mereka mau kembali ke jalan Allah. Dan Allah

---

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 123.

akan menerima taubat mereka selagi mereka mau mengakui kesalahan mereka.

Surah *asy-Syūrā* ayat 40 menjelaskan tentang seharusnya setiap perbuatan harus ada balasannya akan tetapi untuk memaafkan dan memberikan kesempatan seseorang untuk merubah dirinya itulah yang lebih baik karena Allah membenci orang-orang yang selalu melakukan kezaliman.

Lebih jelasnya ayat tersebut adalah, yang artinya: *“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungannya) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”* (Q.S *asy-Syūrā* ayat 40).⁴⁶

Dan seharusnya balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengan kejahatan itu. Akan tetapi Pemberian remisi yang dikemukakan oleh menteri kehakiman dan menteri hukum sebagai anjuran kepada seseorang yang melakukan kejahatan diberikan kesempatan, melakukan perbuatan yang biasa merubah dirinya sendiri, agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat.

Allah sendiri menerima taubat seseorang yang ingin kembali ke jalan Allah, sebagaimana telah diterangkan dalam surah *al-Furqān* ayat 70, yang artinya: *“Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”* (Q.S *al-Furqān* ayat 70).⁴⁷

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang yang menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangnya serta bermohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi perbuatan yang pernah ia lakukan, kalau semua

---

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, 370.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, 28.

itu telah mereka penuhi niscaya Allah akan mengampuni mereka sehingga mereka terbebaskan ancaman siksa bahkan akan diganti oleh Allah dosa-dosa mereka dengan kebajikan.

Dan diteruskan ayat seterusnya yakni ayat 71, yang artinya: *“Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.”* (Q.S *al-Furqān* ayat 71).⁴⁸

Bahwasannya Allah akan memberikan keanugerahannya *taufiq* dan *hidayah*, sehingga dari saat ke saat niat dan tekatnya untuk mendekat kepada Allah semakin kukuh dan amalnya akan semakin baik dan bertambah.

Di samping itu juga dalam surat *al-Mā'idah* dijelaskan, meskipun seseorang pernah melakukan perbuatan pidana atau kejahatan terhadap orang lain dan mereka mau menjalankan pidananya sebagaimana mestinya pidana yang mereka terima dan mereka mau memperbaiki diri, maka Allah menerima taubatnya karena Allah maha Pemurah lagi maha Penyayang.

Disebutkan dalam Q.S *al-Mā'idah* ayat 39, yang artinya: *“Maka barang siapa bertaubat sesudah melakukan penganiayaan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (Q.S.*al-Mā'idah* ayat 39).⁴⁹

Diteruskan dengan Q.S *an-Nisā'* ayat 17, di situ juga menerangkan bahwasanya ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama berkat kebodohnya, dalam artian karena sangat marah, panik, emosi, dorongan hawa nafsu, dan sebagainya, meskipun seperti itu kalau mereka mau menyadari dan melakukan hal yang terbaik setelah melakukan itu Allah pasti akan memutuskan hal yang terbaik pula bagi mereka karena Allah Maha Bijaksana.

---

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, 367.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, 115.

Dari semua keterangan di atas telah dijelaskan bahwasannya setiap kita melakukan tindakan, entah itu tindakan terhadap diri kita ataupun terhadap orang lain sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu kemanfaatan dari perbuatan itu. Semisal, ketika menentukan putusan hukuman terhadap orang yang bersalah, kita harus memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk merubah segala perbuatan mereka yang meresahkan masyarakat, seperti dorongan untuk meninggalkan perbuatannya atau kalau toh mereka terkena hukuman pidana, maka bagi penegak hukum harus memberikan mereka kesempatan untuk melakukan kebaikan seperti misalnya lembaga pemasyarakatan yang telah menaungi para narapidana untuk merubah kehidupannya agar setelah mereka keluar dari lembaga tersebut mereka dapat diterima oleh masyarakat, meskipun orang itu pernah melakukan perbuatan pidana.

2. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana pembunuhan

Sanksi pidana dilahirkan sebagai salah satu upaya untuk tercapainya tujuan dari hukum tersebut yaitu kemaslahatan yang menyeluruh bagi masyarakat.⁵⁰ Pidana atau sanksi baik di hukum positif dan hukum Islam diterapkan meskipun dalam prakteknya tidak disenangi oleh yang tertimpa pidana tersebut. Melihat kondisi seperti ini maka pidana tersebut harus mempunyai nilai yang baik dan ideal antara lain:

- a. Harus mampu mencegah seseorang melakukan maksiat atau mempunyai fungsi preventif dan mampu menjerakan setelah perbuatan.
- b. Memberikan hukuman kepada seseorang bukan berarti membalas dendam melainkan demi kemaslahatan.
- c. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga

---

⁵⁰ Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 298.

seseorang tidak terjatuh kepada kejahatan.

- d. Hukuman digambarkan sebagai sugesti agar orang tidak melakukan kejahatan.

Dari adanya hukuman di atas, menurut hukum pidana Islam, hukuman tersebut sangatlah ideal bagi pelaku yang melakukan tindak pidana karena sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.

Akan tetapi dalam Islam juga mengenal konsep pemaafan dalam mengganti pidana terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Menurut Abdul Qadir Audah pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman, baik pemaafan itu diberikan si korban atau walinya, atau *Ulil Amri* akan tetapi pemaafan itu bukan sebab umum gugurnya hukuman, melainkan sebagai sebab khusus gugurnya hukuman pada setiap *jarimah* selain *jarimah hudūd*.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memaafkan adalah memaafkan *qisās* atau *diyat* tanpa imbalan apa-apa. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Abu Ḥanifah pemaafan terhadap *diyat* itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku atau terhukum. Jadi menurut kedua ulama' terakhir ini pemaafan adalah pemaafan *qisās* tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan *diyat* itu, bukan pemaafan, melainkan perdamaian. Orang yang berhak memaafkan *qisās* adalah orang yang berhak menuntutnya.⁵¹

Penjelasan tersebut memberikan, bahwa pemaafan adalah salah satu hapusnya hukuman *qisās*, dan yang berhak memaafkan adalah ahli waris. Sedang *Ulil Amri* atau hakim dapat memaafkan kalau itu ada kemaslahatannya. Adapun sebagai dasarnya *Q.S al-Baqarah* ayat 178, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah*

---

⁵¹ Djazuli, *Fiqih Jinayah*, 156.

*(yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(Q.S al-Baqarah ayat 178).*⁵²

Dari dalil di atas bahwa *qiṣāṣ* adalah suatu alternatif, yaitu bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan dapat dimaafkan dengan ganti rugi (*diyat*),⁵³ atau sama sekali tanpa *diyat*. Artinya pembunuh dimaafkan secara mutlak. Namun demikian Ulil Amri (penguasa) dapat memberi hukuman. Apabila si Ahli waris memaafkan dengan cuma-cuma tanpa *diyat*, atau si ahli waris itu anak kecil atau gila, maka hakim berhak memberikan hukumannya tergantung kepada kemaslahatan umum.

Sayyid Sabiq menambahkan, dalam kitabnya, Fiqh Sunnah, alternatif memberikan ampunan atau hukum *qiṣāṣ* penentuannya diberikan kepada wali si terbunuh. Mereka adalah ahli waris si terbunuh, bilamana mereka menghendaki boleh menuntut hukuman *qiṣāṣ* atau memberi ampunan, seandainya ada dari salah satu di antara mereka memaafkan maka gugurlah *qiṣāṣ* itu, sebab ia adalah merupakan salah satu dari ahli waris yang tidak terpisah dari anggota lainnya.⁵⁴

Pemaafan ini merupakan konsep yang paling baik. Jika dipandang dari nilai ihsan terhadap sesama manusia konsep ini sangatlah ideal, jika kondisi masyarakat tersebut sudah sangat berbudaya hukum dan taat hukum. Para ulama' sepakat bahwa pemaafan lebih utama dari pada menuntutnya.

---

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, 28.

⁵³ Mubarak, "Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat," 472.

⁵⁴ Sābiq, *Fikih Sunnah*, 44.

Sebagai dasar pemikiran bahwa Allah pun menganggap pemaafan lebih mulia dari pada penjatuhan sanksi dalam surat *al-Maidah* ayat 45, yang artinya: *Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik.*" (*Q.S al-Maidah ayat 45*).⁵⁵

Disamping itu, ada satu ḥadis| yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik berkata bahwa setiap ada perkara *qisās* yang dilaporkan kepada Rasulullah beliau selalu memerintahkan orang-orang yang akan melakukan *qisās* tersebut untuk memaafkan.

Dan dalam surat *asy-Syūrā* ayat 40 juga menjelaskan. Dan seharusnya balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengan kejahatan itu. Maka barang siapa memaafkan, yakni sedikitpun tidak menuntut haknya, atau mengurangi tuntutananya sehingga tidak terjadi pembalasan yang serupa itu, lalu menjalin hubungan yang harmonis dan berbuat baik terhadap orang yang pernah menganiayanya secara pribadi, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang selalu berbuat *kezaliman* dimuka bumi.

Dalam keterangan pada ayat diatas sebagai anjuran untuk kita agar selalu memaafkan dan berbuat baik itu, tujuannya adalah agar tidak terjadi pelampauan batas atau penempatan sesuatu bukan pada tempatnya, karena perbuatan yang sedemikian itu sangat dibenci oleh Allah.

Sebenarnya kalau kita sadar pemaafan tersebut akan lebih menyentuh psikologis kepada pelaku kejahatan dari pada penjatuhan sanksi. Dengan pemaafan tersebut pelaku akan berpikir betapa mulianya kasih Allah yang memberikan melalui si korban atas keluarganya, meskipun akan melihat betapa agungnya perbuatan tersebut.

---

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 116.

3. Aplikasi pemaafan terhadap pidana pembunuhan.

Dalam bab dua dijelaskan bahwa pembunuhan termasuk pada jarimah *qiṣāṣ* dan penerapannya menjadi hak ahli waris. Maka penerapannya ada beberapa kemungkinan seperti hukuman *qiṣāṣ* bisa berupa diyat karena pemaafan dari saudara korban atau pemaafan yang diberikan pelaku pembunuhan tanpa adanya ganti rugi (*diyat*). Ada juga unsur pemaafan yang dilakukan oleh *Ulil Amri* atau hakim. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa hukuman yang wajib bagi pembunuh adalah *qiṣāṣ*, sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam surah *al-Baqarah* ayat 178

Dalil tersebut secara tegas menyatakan bahwa hukuman *qiṣāṣ* bagi pelaku pembunuhan adalah pasti. Logika dari penganggapan ini adalah jika wali korban memaafkan secara mutlak (tidak membayar *diyat*). Maka tidak ada kewajiban bagi pelaku membayar *diyat*, tetapi pembunuh dengan kesadarannya membayar *diyat* sebagai kompensasi pemberian maafnya wali dari si korban.

Dengan demikian, mereka (ahli waris) menginginkan memaafkan secara mutlak atau memaafkan dari *qiṣāṣ* dengan membebani *diyat* kepada pelaku pembunuhan sebagai penggantinya tebusan, maka itu dibenarkan didalam al-Qur'an.⁵⁶

Hal ini sesuai dengan firman Allah saw surah *al-Baqarah* ayat 178, yang artinya: "*Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*" (Q.S *al-Baqarah* ayat

---

⁵⁶ M. Qurish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 393.

178).⁵⁷

Di sini terlihat bahwa agama tidak memaksakan pemaafan, karena pemaafan yang dipaksakan akan berdampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dibenarkan bahkan terpuji. Maka jika pembunuh mendapatkan pemaafan dari saudara korban hendaklah yang dimaafkan mengikuti dengan cara yang baik pula. Akan tetapi bagi pihak yang memaafkan tidak boleh sekali-kali menuntut tebusan melampaui batas yang wajar, dan juga yang menebus menunda-nunda tanpa alasan atau mengurangi pembayaran, kalau si wali korban meminta tebusan. Karna bagi si wali korban kalau sewenang-wenang dengan pelaku, seperti melampaui batas dengan menganiaya pembunuh yang dimaafkan atau keluarga korban sesudah menerima ketetapan di atas, maka bagi mereka siksa yang sangat pedih.⁵⁸

Menurut H.A Jazuli memaafkan orang yang melakukan pembunuhan dan atau pelukaan dari si korban atau keluarganya sangat di dorong dan terpuji, walaupun demikian tidak berarti si pembunuh tidak kena hukuman. Sanksinya diberikan kepada *Ulil Amri*, karena si pembunuh melanggar dua hak yaitu hak perorangan dan hak masyarakat/jama'ah/Allah.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, tentang kriteria pemaafan terhadap pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam, itu dapat dilakukan apabila si korban atau ahli waris tidak melaksanakan hukuman *qiṣāṣ*, artinya si korban atau ahli waris memaafkan dari hukuman *qiṣāṣ* adapun kriteria pemaafan sebagai berikut:

- a. Si pemaaf harus mengatakan saya telah memaafkan
Pernyataan untuk memberikan pengampunan

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 28.

⁵⁸ Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 393.

⁵⁹ Djazuli, *Fiqih Jinayah*, 157.

tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Redaksinya bisa dengan *lafaz* (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan, dan sebagainya, atau *lafaz* yang setara dengan perkataan itu.⁶⁰

- b. Si pemaaf harus berasal dari yang mempunyai hak, karena fungsinya menggugurkan hak. Sedangkan menggugurkan hak yang tidak mempunyai hak (orang lain) tidak sah.
- c. Si pemaaf harus berakal atau *balig*,⁶¹ maka tidak sah pemaafan dari anak kecil atau orang gila. Meskipun memiliki hak tetap, karena ada unsur madharat dari anak kecil atau orang gila yang menyebabkan dia yang memiliki hak.
- d. Pemaafan itu haruslah tidak disertai *diyāt*, kecuali pemaafan itu berbentuk perdamaian (*ṣulh*) yang merupakan pendapat Mazhab Ḥanafi, sedang menurut pendapat Imam asy-Syafi'i jika *qiṣāṣ* gugur dengan pemaafan tidak diganti dengan *diyāt*.⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas hukuman *qiṣāṣ* dapat digugurkan atau dimaafkan oleh si ahli waris, apabila ia memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Tetapi dari kriteria pemaafan tersebut ada juga *intervensi* dari *Ulil Amri* (penguasa), misalnya apabila si ahli waris itu masih kecil atau gila, maka si ahli waris menunggu sampai anak kecil dewasa atau *balig* dan yang gila sampai sembuh dari penyakitnya, maka mereka boleh memaafkannya si pelaku, tapi seandainya si ahli waris itu anak kecil dan gila tidak sembuh, maka hukumannya dapat dialihkan kepada *Ulil Amri* untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi pelaku pembunuhan.

4. Aplikasi pemaafan terhadap keputusan hakim

Selain ahli waris hakim juga berhak melakukan

---

⁶⁰ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 161.

⁶¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 154.

⁶² Djazuli, 154.

menentukan pidana terhadap pelaku atau juga menimbang untuk memberikan pidana penjara atau mendapatkan pemaafan. Seorang hakim dapat melakukan hukuman apabila korban tidak mempunyai ahli waris selain saudara seagama, menurut kesepakatan *Fuqahā'*, masalahnya diserahkan kepada pemerintahan (*sulṭan*). Hal ini sesuai dengan *qaidah syar'iyah* yang bersumber dari Ḥadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizī, dan Ibn Majah, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Maka sulṭan (pemerintah) adalah wali dari orang yang tidak mempunyai wali."⁶³

Ḥadis di atas menjelaskan ketika seorang terbunuh tidak memiliki ahli waris satu pun dari saudara sesama agama, maka pelimpahan diserahkan terhadap pemerintahan karena yang lebih mempunyai hak adalah pemerintahan tersebut.

Akan tetapi apabila *mustahiq qiṣāṣ* itu masih di bawah umur atau gila, para ulama' berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama' Ḥanafiah, pelaksanaan hukuman *qiṣāṣ* menunggu sampai ia dewasa atau sampai sembuh dari gila. Sebagian yang lain berpendapat hukuman *qiṣāṣ* dilaksanakan oleh *qadī* (hakim) yang mewakili *mustahiq* tersebut. Menurut Malikiyah pelaksanaan hukuman *qiṣāṣ* tidak perlu menunggu anak tersebut dewasa atau sembuh dari gila, dan wali atau *waṣiy* diberi kekuasaan untuk melaksanakan *qiṣāṣ*, atau mengambil *diyat kamilah*. Menurut Syafi'iyah dan Ḥanabilah, pelaksanaan hukuman *qiṣāṣ* harus menunggu anak itu dewasa atau sembuh dari gila. Alasannya adalah karena *qiṣāṣ* itu tujuannya untuk mengobati rasa duka, dan untuk menghilangkannya tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, baik itu hakim atau wali.⁶⁴

Lebih jauh lagi al-Mawardi berpendapat berhubungan dengan pemaafan ini, sebagai berikut:⁶⁵

⁶³ Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah AL-Turmudhy, *Sunan al-Turmudhy*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 352.

⁶⁴ 'Audah, *Al-Tashrī' al-Jināy al-Islāmy*, 158.

⁶⁵ Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, 238.

- a. Bila pemaafan hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka *Ulil Amri* bisa memiliki atau menjatuhkan sanksi *ta'zir* atau memaafkan.
- b. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim korban, maka *Fuqahā'* berbeda pendapat tentang hapusnya hak *Ulil Amri* untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa *Ulil Amri* itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abdullah Zubair. Demikian pula pendapat Imam Ibn Ḥanbal, sedangkan menurut pendapat ulama' lain hak *Ulil Amri* untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak jama'ah, baik sebelum pengajuan gugatan oleh korban merupakan seluruhnya, tidak dapat dihapus.

Apabila terjadi kasus seorang bapak tidak dihukum mati karena membunuh anaknya, sementara sang anak akan dihukum mati karena membunuh bapaknya. *Ta'zir* terhadap sang bapak adalah hak hukum pemerintah dan intansi pelurusan perilaku masyarakat, sementara sang anak tidak mempunyai hak atas *ta'zir* tersebut. Pejabat pemerintahan yang berwenang boleh memberikan pengampunan bagi sang bapak, sedangkan *ta'zir* terhadap sang anak menjadi hak bersama sang bapak dan pemerintah.

Oleh karena itu, pejabat pemerintahan yang berwenang tidak boleh secara sendirian memberikan pengampunan kepada sang anak sementara sang bapak tetap menuntut dilakukan *ta'zir* terhadap sang anak. Dalam kasus seperti ini, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan hukuman *ta'zir* bagi anak.⁶⁶

F. Penutup

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

⁶⁶ Al-Mawardi, 238.

1. Tindak pidana pembunuhan yang mendapatkan remisi memiliki kriteria masing-masing, dalam artian pemberian remisi tergantung darimana hukuman, masa hukuman tergolong sementara atau tergolong pidana mati kalau pidananya sementara, maka akan mendapatkan remisi dengan syarat-syarat tertentu, kalau pidana dengan hukuman pidana mati, maka tidak bisa kecuali ada ketentuan yang lain.
2. Tata cara dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Keputusan Presiden dan Menteri Hukum.
3. Jika ditinjau dari hukum pidana Islam pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sangat baik, karena dengan adanya remisi itu bisa menjadikan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya dan juga memberikan kesempatan pada pelaku pembunuhan untuk menghindari perbuatan itu lagi, dengan tujuan dan dorongan untuk kembali ketengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi. *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- AL-Turmudhy, Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah. *Sunan al-Turmudhy*. Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- 'Audah, Abdul Qodir. *Al-Tashrī' al-Jināy al-Islāmy*. Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992.
- Bukhāri, Muḥammad bin Isma'īl al-. *Ṣaḥīḥ lal-Bukhāri*. Juz 8. Kairo: Dār Iḥya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Ḥajjāj, Muslim ibn al-. *Jāmi' al-Ṣohīh*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hamzah, Andi, dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hanafī, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mubarok, Nafi'. "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak." *Jurnal Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016).
- . "Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayah." *Jurnal Al-Qānūn* 12, no. 2 (Desember 2009).
- . "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Praja, Juhaya, S. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Purnomo, Bambang. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: liberty, 1988.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Husein Nabhan. Juz 10. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Shihab, M. Qurish. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politeia, 1984.
- Zuḥaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. juz 6. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.